



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

Jln. Jendral. Sudirman No.22 Manokwari-Papua Barat Kode Pos 96312
Telepon/HIP : 081344526552 e-mail: bawaslu.manokwari@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

NOMOR : 015 /HK.01.01/K.PB-03/08/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN MANOKWARI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyamaan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Manokwari, Kepolisian Resor Kota Manokwari, Kejaksaan Negeri Kabupaten Manokwari perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - b. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024, memiliki potensi terjadinya Tindak Pidana Pemilihan dalam setiap tahapannya, sehingga dipandang perlu untuk dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Manokwari Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik

7. Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;

Memperhatikan

1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : PRIN-962G/R.2.10/Es/08/2024 tertanggal 02 Agustus 2024 perihal Keanggotaan

Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari dari unsur Kejaksaan Negeri Manokwari Papua Barat

4. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Papua Barat Nomor Sprin/300/VI/HUK.6.6./2024 Tanggal 13 Juni 2024; dan
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Kabupaten Manokwari Nomor: 200.2/47/2024 Dan Nomor : 005/HK.01.01/PB-03/01/2024 Tanggal 1 Februari 2024 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Manokwari ;
- KEDUA :** Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Manokwari pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Manokwari bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
Pada Tanggal 03 Agustus 2024



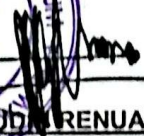
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR :015/HK.01.01/K.PB-03/08/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN MANOKWARI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1.	Samsudin Renuat	Ketua Bawaslu Manokwari	Penasehat
2.	RB. Simanungsong, S.I.K.,M.Si	Kapolresta Manokwari	Penasehat
3.	Teguh Suhendro, S.H., M.Hum	Kajari Manokwari	Penasehat
4.	Yustinus Y. Maturan	Anggota Bawaslu Manokwari	Pembina
5.	D.Raja Putra Napitupulu,S.I.K.,M.M	Kasat Reskrim Polresta Manokwari	Pembina
6.	I Nengah Ardika, SH.,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
7.	Alberthina Jumame	Anggota Bawaslu Manokwari	Koordinator
8.	D.Raja Putra Napitupulu,S.I.K.,M.M	Kasat Reskrim Polresta Manokwari	Koordinator
9.	I Nengah Ardika, SH.,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Koordinator
10.	Melkianus F Mandowen	Kepala Sekertariat Bawaslu Manokwari	Anggota
11.	Bernad Menanti	Staf Bawaslu Manokwari	Anggota
12.	Yoopie Y Sopacua	Staf Bawaslu Manokwari	Anggota
13.	Yudita N.R. Sabandafa	Staf Bawaslu Manokwari	Anggota
14.	Betklinten J Su	Staf Bawaslu Manokwari	Anggota
15.	Tira Rosalia	Staf Bawaslu Manokwari	Anggota
16.	Muhammad Anas Yusuf, S.H	Kaur Bin OPS Polresta Manokwari	Anggota
17.	Ewin Efrika	Kasubnit 1 Tipidter Polresta Manokwari	Anggota

18.	Didit Wahyudi, S.H	Kasubnit 1 Siber Polresta Manokwari	Anggota
19.	Rodi Lintong	Kasubnit 1 Tahbang Polresta Manokwari	Anggota
20.	Adriansyah	Banlit Tipidter Polresta Manokwari	Anggota
21.	Lawinner G Sitorus	Banlit Tipidum Polresta Manokwari	Anggota
22.	Muhammad Ihsan Husni, S.H.	Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Manokwari	Anggota
23.	Muhammad Dasim Bilo, S.H.	Kasi BB & BR Kejaksaan Negeri Manokwari	Anggota
24.	Fedrika Yakomina Uruway, S.H.	Jaksa Fungsional BR Kejaksaan Negeri Manokwari	Anggota

Ditetapkan di Manokwari
Pada Tanggal 03 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**
KETUA,

SAMSUDIN RENUAT